

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

PENDAPAT MODIFIKASIAN KELANGSUNGAN HIDUP:
SINYAL PERINGATAN AWAL TENTANG KEGAGALAN
ENTITAS



SANY DWITA

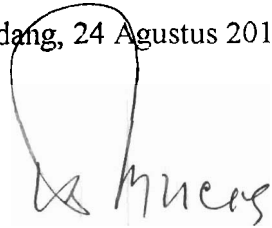
MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL.	26-8-2010
SUMBER HARGA	HD
KOLEKSI	K1
NO. INVENTARIS	360/H0/2010-p.1
ALASIAKASI	697.45 Dwi p.1

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Makalah ini sudah dibaca oleh Pembaca Ahli

Padang, 24 Agustus 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bustari Muchtar', is written over a faint, rectangular stamp or watermark.

Prof. Dr. Bustari Muchtar
NIP. 19490617 197503 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan Alhamduillahirabbil'alamiin, akhirnya makalah yang berjudul "Pendapat Modifikasian Kelangsungan Hidup: Sinyal Peringatan Awal tentang Kegagalan Entitas" dapat diselesaikan penulisannya. Makalah ini merupakan upaya memberikan informasi dan sekaligus sosialisasi terhadap makna dari pemberian opini audit dalam audit laporan keuangan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembaca ahli yang telah membaca makalah ini. Juga rekan-rekan dosen di Fakultas Ekonomi UNP, terutama pada Program Studi Akuntansi, yang memberikan bantuan dan pandangannya terhadap penulisan makalah ini.

Akhirnya, makalah ini terpulang kepada kritik dan saran dari para pemerhati dan pembaca dalam perbaikannya. Tanggung jawab penuh atas materinya berada di tangan penulis.

Atas perhatian dan bantuan yang telah penulis terima, diucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm.
Pendahuluan	1
Jenis-Jenis Pendapat dalam Laporan Audit	2
Pendapat Modifikasian Kelangsungan Hidup	6
Tuntutan Publik terhadap Auditor	9
Respon Dewan Pembuat Standar Auditing	13
Respon Auditor dalam Praktik	15
Kandungan Informasi Pendapat Kelangsungan Hidup	19
Simpulan	23
Daftar Pustaka	25

PENDAPAT MODIFIKASIAN KELANGSUNGAN HIDUP: SINYAL PERINGATAN AWAL TENTANG KEGAGALAN ENTITAS

Sany Dwita*

PENDAHULUAN

Kita menyaksikan tuntutan publik agar auditor lebih berperan sebagai pemberi sinyal kebangkrutan usaha. Tuntutan ini semakin meningkat setelah terjadinya beberapa kebangkrutan perusahaan terkemuka di AS tidak lama setelah menerima pendapat audit wajar tanpa pengecualian beberapa tahun terakhir ini. Kasus yang paling menggemparkan adalah jatuhnya perusahaan raksasa Enron pada tahun 2001.

Tuntutan pengguna laporan keuangan agar pendapat audit dapat berperan sebagai pemberi peringatan awal akan kegagalan entitas ternyata sudah muncul jauh sebelum terjadinya peristiwa Enron. Sebagaimana Carcello et al [1995] menyatakan bahwa selama 20 tahun terakhir, pengguna laporan keuangan, pembuat kebijakan, dan pengadilan terfokus pada pendapat audit terkait dengan kebangkrutan. Ketika perusahaan jatuh tak lama setelah penerbitan pendapat standar (*unmodified opinion*), seringkali publik mempersepsikan bahwa pengguna laporan keuangan seharusnya menerima sinyal peringatan awal dari auditor (Berton [1985]; Berton dan Ingersoll [1985]; Campbell dan Mutchler [1988]; Charmichael dan Pany [1993] dalam Carcello et al. [1995]). Salah seseorang penulis bertanya, "Mengapa begitu banyak akuntan gagal memperingatkan publik bahwa perusahaan yang mereka audit berada di ambang kebangkrutan?" (Berton

[1992] dalam Carcello et al. [1995]). Pendapat audit terkait kebangkrutan juga berperan penting dalam tuntutan hukum terhadap auditor (St. Pierre dan Anderson [1984]; Palmrose [1987] dalam Carcello et al. [1995]).

Tulisan ini membahas tentang keyakinan sebagian besar orang bahwa pendapat modifikasian keberlangsungan usaha dapat berperan sebagai sinyal peringatan awal tentang kegagalan usaha entitas yang diaudit. Urutan pembahasan dalam tulisan ini selanjutnya adalah sebagai berikut: jenis-jenis pendapat dalam laporan audit, pendapat modifikasian kelangsungan hidup, tuntutan publik terhadap auditor, respon dewan pembuat standar auditing, respon auditor dalam praktik, kandungan informasi dari pendapat modifikasian kelangsungan hidup, dan simpulan.

JENIS-JENIS PENDAPAT DALAM LAPORAN AUDIT

Menurut Boynton et al. [1996], laporan audit berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan simpulan formal tentang laporan keuangan auditan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan audit yang berlaku umum (GAAS). Secara umum, dikenal dua jenis laporan audit:

1. LAPORAN STANDAR

- a. Paragraf lingkup audit (*scope paragraph*); menggambarkan sifat dan lingkup audit. Paragraf ini memenuhi standar pelaporan keempat yang mengharuskan auditor memberikan petunjuk yang jelas tentang karakter audit juga batasan audit.

Paragraf pendapat (*opinion pharagraph*); memenuhi keempat standar pelaporan Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan, dikenal juga sebagai laporan audit bentuk baku. Berisi opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU/GAAP). Simpulan ini dapat diekspresikan hanya jika auditor menghasilkan opini berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS (Boynton et al. [1996]).

Laporan standar terdiri dari tiga paragraf yaitu:

- b. Paragraf pengantar (*introductory pharagraph*); tujuan paragraf ini adalah untuk memisahkan tanggung jawab manajemen dari auditor.
- c. berisi pernyataan tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. PENYIMPANGAN DARI LAPORAN STANDAR

Ada kemungkinan terjadi situasi yang menyebabkan tidak tepat bagi auditor menerbitkan laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar dibagi menjadi dua kategori:

- a. Laporan baku yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penambahan bahasa penjelas.

Ciri yang membedakan jenis laporan ini adalah bahwa paragraf pendapat tetap menyatakan opini wajar karena laporan keuangan sesuai dengan PABU.

Namun, ada beberapa situasi yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelasan atau bahasa penjelas lainnya ke laporan audit standar (Boynton et al. [1996]).

AU 508 menyediakan panduan tentang situasi yang mengharuskan jenis penyimpangan dari laporan standar. Sementara informasi penjelas biasanya disediakan dalam paragraf penjelas setelah paragraf pendapat, dalam beberapa kasus informasi ini hanya berupa tambahan kata-kata penjelas dalam tiga paragraf standar, dan di kasus lain paragraf penjelas ditambahkan sebelum paragraf pendapat (Boynton et al. [1996]).

Menurut Boynton et al. [1996], situasi yang dapat menyebabkan tambahan informasi penjelas dalam laporan standar dengan pendapat wajar adalah:

- 1) Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku yang perlu untuk penyajian situasi yang tidak biasa secara wajar.
- 2) Ketidakkonsistenan dalam penggunaan prinsip akuntansi yang sesuai dengan PABU.
- 3) Keraguan substansial (*substantial doubt*) tentang status kelangsungan hidup entitas yang dijelaskan dalam PABU.
- 4) Penekanan tentang suatu hal (*emphasis of a matter*) oleh auditor.
- 5) Pendapat berdasarkan laporan auditor lain yang di dalamnya tidak ada pembatasan lingkup audit atau penyimpangan terhadap PABU.

b. Pernyataan pendapat selain wajar tanpa pengecualian

Menurut Boynton et al. [1996], kategori penyimpangan kedua terjadi jika salah satu situasi berikut ini terjadi:

- Laporan keuangan mengandung penyimpangan material dari PABU.
- Auditor tidak bisa memperoleh bukti kompeten yang memadai mengenai satu atau lebih asersi manajemen, dan sebagai akibatnya, tidak ada dasar yang

rasional bagi opini wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kasus ini, auditor akan menyatakan salah satu opini berikut:

- a) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) yang menyatakan bahwa kecuali untuk dampak yang dinyatakan dalam pengecualian, laporan keuangan disajikan wajar sesuai PABU.
- b) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai PABU.
- c) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan.

Dalam situasi penyimpangan dari PABU, termasuk penggunaan prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum, kesalahan penerapan PABU, dan tidak melakukan pengungkapan yang diharuskan oleh PABU, auditor akan mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Pendapat tidak wajar digunakan hanya untuk penyimpangan yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

Kapanpun salah satu pendapat ini digunakan, alasan pendapat itu harus dijelaskan dalam satu atau lebih paragraf penjelas tepat sebelum paragraf pendapat. Paragraf pendapat kemudian dimulai dengan sebuah acuan ke paragraf penjelas. Diikuti dengan kata-kata yang tepat dengan jenis pendapat yang dikeluarkan Boynton [1996].

Situasi yang dapat menyebabkan penerbitan pendapat wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat oleh auditor adalah:

- Pembatasan lingkup audit.
- Ketidaksesuaian dengan PABU (selain penyimpangan yang dibolehkan dalam kondisi tidak biasa).
- Ketidakkonsistenan prinsip akuntansi yang tidak ada dalam PABU.
- Pengungkapan yang tidak memadai.
- Ketidakpastian yang tidak dijelaskan dalam PABU.
- Keraguan besar tentang status kelangsungan hidup entitas yang tidak dijelaskan dalam dalam PABU.
- Kondisi berkaitan dengan pendapat yang sebagian didasarkan kepada laporan auditor lain yang melibatkan pembatasan lingkup audit atau ketidaksesuaian dengan PABU.

PENDAPAT MODIFIKASIAN KELANGSUNGAN HIDUP

Auditor bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat keraguan besar (*substantial doubt*) terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas, tidak lebih satu tahun sejak tanggal laporan auditan. Penilaian auditor didasarkan atas pengetahuannya tentang kondisi dan peristiwa yang telah terjadi atau yang ada pada saat pekerjaan laporan audit selesai. Jika auditor ragu atas kelangsungan hidup entitas maka auditor harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen yang ditujukan

untuk mengatasi masalah tersebut dan menilai peluang bahwa rencana tersebut dapat berjalan efektif (Halim [2003]).

Bila auditor ragu mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor harus mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap laporan keuangan serta memadai tidaknya pengungkapan dalam laporan keuangan entitas tersebut. Untuk selanjutnya auditor harus mengungkapkan keraguannya tersebut dalam laporan audit setelah paragraf pendapat. Jika, berdasarkan pertimbangan auditor, rencana manajemen untuk mengatasi masalah tersebut tidak dapat berjalan efektif maka auditor dapat memilih tidak memberi pendapat dan di dalam laporan audit harus ada paragraf penjelasan (sebelum paragraf pendapat) yang menjelaskan alasan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (Halim [2003]).

AICPA [1987] sec. 340 dalam Hopwood et al. [1989] memberikan panduan bagi auditor ketika ada keraguan akan kelangsungan hidup entitas. Dinyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan untuk menerbitkan pendapat kelangsungan usaha (*going-concern opinion/GCO*). Ini merupakan jenis pendapat “tergantung kepada” (*subject to*) khusus yang menunjukkan bahwa auditor yakin hasil laporan keuangan disajikan dengan wajar “tergantung kepada” resolusi ketidakpastian kelangsungan hidup.

PENDAPAT “TERGANTUNG KEPADA”

Ketika auditor menghadapi situasi yang didalamnya hasil dari suatu kejadian tidak dapat diestimasi dengan rasional di saat laporan keuangan diterbitkan, dan yakin bahwa resolusi dari masalah tersebut akan memiliki efek material terhadap laporan keuangan saat itu kalau hasilnya diketahui, auditor harus mengeluarkan pendapat “tergantung kepada” (*subject to opinion*) (AICPA 1987 sec. 509.21-.26 dalam Hopwood et al. [1989]). Yaitu, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar “tergantung kepada” efek dari ketidakpastian itu. Contoh ketidakpastian termasuk pemulihan biaya yang ditunda, litigasi atau ketidakpastian PPh, realisasi aset tertentu, dan, tentu saja, ketidakpastian secara umum tentang apakah entitas akan terus eksis.

Ketidakpastian akan dikelompokkan dalam kategori item “informasi berlawanan” (*contrary information*) yang dapat menimbulkan keraguan akan kemampuan kelangsungan hidup entitas berdasarkan PABU seperti yang dijelaskan dalam SAS No. 34 (AICPA [1987] sec. 340.04 dalam Hopwood et al. [1989]). Sehingga, ketidakpastian material bisa jadi merupakan gejala ketidakpastian kelangsungan hidup secara umum dan lebih sering terjadi pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal ini menyiratkan bahwa pengguna laporan keuangan bisa jadi menganggap pendapat “tergantung kepada” berguna sebagai sinyal peringatan kebangkrutan (Hopwood et al. [1989]).

PENDAPAT KELANGSUNGAN HIDUP (GCO)

Pendapat wajar dengan pengecualian berarti bahwa “kecuali untuk” (*except for*) atau “tergantung kepada” (*subject to*) efek dari hal-hal tertentu, laporan keuangan disajikan secara wajar dalam posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Pendapat “kecuali untuk” ini dikeluarkan ketika lingkup pemeriksaan auditor dibatasi, laporan keuangan menyimpang dari PABU, atau PABU tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat “tergantung kepada” dikeluarkan ketika ada ketidakpastian tentang hasil suatu kejadian; termasuk jika ada keraguan tentang kelangsungan hidup dari entitas (AICPA [1987], sec. 509 dan 340 dalam Hopwood et al [1989]). Pendapat wajar dengan pengecualian baik karena pembatasan lingkup audit atau penyimpangan dari PABU jarang terjadi. Merupakan hal yang wajar untuk meyakini bahwa ada hubungan signifikan antara tipe pendapat modifikasi ini dengan kebangkrutan; sehingga jenis pendapat ini dapat berperan sebagai “bendera merah” bagi pengguna laporan keuangan (Hopwood et al. [1989]).

TUNTUTAN PUBLIK TERHADAP AUDITOR

Publik tetap konsisten dengan tuntutanannya agar pendapat audit wajar dengan pengecualian berperan sebagai sinyal peringatan awal akan kegagalan entitas (Journal of Accountancy [1982], [1983] dalam Hopwood et al. [1989]). Hal ini disebabkan sifat dari pendapat wajar dengan pengecualian auditor menimbulkan keyakinan bahwa auditor dapat memberikan sinyal tentang kegagalan entitas (Hopwood et al. [1989]).

Tuntutan publik ini difasilitasi oleh badan legislatif AS dengan menjadikannya peraturan hukum. Dua peraturan hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap profesi akuntan publik dekade terakhir ini adalah PLSRA dan SOX.

PLSRA (1995-2001)

Pihak legislatif juga terus tertarik pada fenomena perusahaan yang mengajukan permohonan bankrut tidak lama setelah menerima laporan audit wajar tanpa pengecualian, dan telah mengkritisi hal tersebut sebagai akibat kegagalan audit atau tidak memadainya pelaporan dari profesi akuntan publik (Euingsen et al. [1989]; Carmichael dan Pany [1993] dalam Geiger et al [2001]). Persepsi akan kinerja auditor yang tidak memadai ini diyakini banyak pihak mendorong dengan pendapat Kongres AS tentang profesi akuntan publik dan perannya dalam memperingatkan publik tentang kegagalan bisnis yang terjadi (U.S. House of Representatives [1985], [1990] dalam Geiger et al. [2001]). Manifestasi perhatian legislatif di area ini terbukti dalam persyaratan pelaporan kelangsungan hidup suatu entitas di PLSRA (*Private Securities Litigation Reform Act*) [1995] (dalam Geiger et al. [2005]) yang secara khusus mengharuskan bahwa “setiap audit ... laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan publik independen harus mencakup ... suatu evaluasi apakah ada keraguan besar tentang kemampuan penerbit laporan keuangan untuk terus berlangsung hidup selama tahun fiskal berikutnya.” Ketentuan pelaporan kelangsungan hidup entitas oleh PSLRA secara signifikan membentuk standar profesional pada saat itu menjadi sebuah peraturan

hukum. Namun, fakta bahwa Kongres AS mewajibkan prosedur auditing tertentu untuk semua audit terhadap anggota SEC untuk pertama kalinya sejak 1934 dengan mengangkat pelaporan kelangsungan hidup ke status hukum menunjukkan bahwa perhatian besar pihak legislatif mengenai peringatan awal kegagalan klien dalam waktu dekat yang berbentuk pendapat audit modifikasian kelangsungan hidup (*going-concern opinion/GCO*).

Di sisi lain, Geiger et al [2001] menyatakan bahwa profesi akuntan publik meraih kemenangan, setelah lobi bertahun-tahun, dengan berlakunya PSLRA (*The Reform Act*) tahun 1995 melalui veto Presiden Clinton. Secara umum *Reform Act* ini memberikan pembebasan bagi profesi akuntan publik dengan (1) membuat semakin sulit bagi pengacara penuntut mengajukan tuntutan *class-action* dengan sukses terhadap auditor dan (2) memberlakukan pembagian secara proporsional terhadap pembebanan kewajiban keuangan yang dituntut terhadap auditor.

SOX (2002–SEKARANG)

Periode sejak Desember 2001 merupakan periode penuh kekacauan bagi profesi akuntan publik di AS. Jatuhnya perusahaan-perusahaan terkemuka di AS tidak lama setelah menerima pendapat audit wajar tanpa pengecualian menyebabkan profesi mendapat sorotan tajam oleh pihak legislatif, eksekutif, media dan publik. Perhatian pihak legislator ini terus meningkat dan memicu sikap yang mempertanyakan peran auditor dalam memperingatkan publik akan kegagalan klien dalam waktu dekat (US House of Representatives [1985], [1990], [2001], [2002]; U.S. Senate [2002] dalam Geiger et al. [2005]).

Setelah sejumlah dengar pendapat Kongres, diawali sejak bulan Desember 2001, pada bulan Juni 2002 Kongres AS menerbitkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), membentuk PCAOB (*Public Company Oversight Board*) dan menetapkan persyaratan dan batasan baru bagi auditor perusahaan publik (Congress of the United States of America, [2002] dalam Tackett at al. [2004]). SOX dimaksudkan agar SEC (melalui PCAOB) untuk mengawasi audit perusahaan publik yang dilakukan profesi akuntan, sehingga memulihkan sebagian kepercayaan yang hilang terhadap perusahaan-perusahaan AS.

Menurut Tackett at al. [2004], ketentuan utama SOX yang potensial untuk mengurangi kemungkinan terjadinya “kegagalan audit” adalah:

1. Aktivitas PCAOB; wewenang PCAOB berupa membuat peraturan, mengaudit auditor, dan menetapkan sanksi.
2. Aturan baru tentang komite audit; SOX mewajibkan auditor melapor kepada dan diawasi oleh komite audit perusahaan.
3. Sanksi kriminal baru dan perlindungan terhadap *whistle-blowers*; SOX mempertinggi hukuman kriminal untuk kecurangan sekuritas, *mail* dan *wire* dari lima menjadi sepuluh tahun penjara.
4. Batasan terhadap pemberian jasa konsultasi; SOX melarang auditor memberikan konsultasi kepada klien berupa pencatatan akuntansi, sistem informasi akuntansi, jasa valuasi, jasa aktuarial, audit internal, fungsi manajerial, jasa investasi, jasa hukum yang tidak terkait dengan audit, dan jasa-jasa lain yang dilarang oleh PCAOB.

5. Prosedur pelaporan keuangan dan prosedur auditing yang baru; SOX

mengharuskan review menyeluruh dan persetujuan oleh patner kedua untuk setiap laporan audit yang diajukan ke SEC.

Bahkan, sekarang, ada pembaharuan dalam ketertarikan pihak legislatif, media, dan pemerintah mengenai sinyal peringatan awal dari auditor sebelum kebangkrutan klien terjadi. Selama dengar pendapat di Senate Banking Committee, mantan ketua SEC menuntut agar semua audit wajib direview ketika perusahaan mengajukan kebangkrutan dalam batas periode penerimaan pendapat audit “bersih” (Breedon [2002] dalam Geiger [2005]).

RESPON DEWAN PEMBUAT STANDAR AUDITING

Merespon tuntutan publik, standar profesional berhubungan dengan kelangsungan usaha menjadi semakin ketat seiring berjalannya waktu. Panduan selama tahun 1970-an dikandung dalam SAP No. 33 (AICPA [1963] dalam Carcello et al. [1995]) dan SAS No.2 “*Reports on Audited Financial Statement*” (AICPA [1974] dalam Carcello et al. [1995]). SAP No. 33 meminta auditor mendiskusikan ketidakpastian yang tidak wajar dalam laporan audit ketika efek pasti dari ketidakpastian tersebut tidak dapat ditentukan pada tanggal laporan keuangan. SAS No. 2 meminta auditor memodifikasi laporannya atau menerbitkan laporan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) ketika ada ketidakpastian material. Dalam mengevaluasi status kelangsungan usaha, pemulihan (*recoverability*) dan klasifikasi (*classification*) aset dan kewajiban harus dipertimbangkan (Carcello et al. [1995]).

SAS No. 34 (AICPA [1981] dalam Carcello et al. [1995]) tidak meminta auditor memvalidasi asumsi kelangsungan usaha. Tapi, standar ini meminta “auditor tetap waspada bahwa standar auditing yang diterapkan untuk tujuan lain mungkin membawa perhatian terhadap informasi yang berlawanan dengan asumsi [kelangsungan usaha]“ (para.3).

Setelah itu, SAS No. 34 digantikan oleh SAS No. 59 (AICPA [1988] dalam Carcello et al. [1995]) yang, identik dengan PLSRA, mewajibkan auditor melakukan usaha menguatkan terhadap evaluasi setiap status kelangsungan usaha klien untuk periode satu tahun ke depan. Selain itu, jumlah bukti yang tersedia bagi auditor untuk penilaian kelangsungan usaha meningkat karena dikeluarkannya standar *expectation gap* lain bersamaan dengan SAS No. 59 (Franz dan Lampe [1993] dalam Carcello et al. [1995]). Sekarang, auditor memiliki tanggung jawab yang lebih besar di bidang kecurangan, tindakan ilegal, dan estimasi akuntansi. Juga, sekarang, penggunaan prosedur analitis diharuskan dalam tahap perencanaan dan review dalam audit (Carcello et al. [1995]).

Carcello et al. [1995], secara keseluruhan, standar profesional untuk evaluasi kelangsungan usaha telah menjadi semakin eksplisit dan ketat. SAS No. 59 mendiskusikan tiga langkah proses evaluasi kelangsungan usaha: (1) mempertimbangkan hasil audit yang menunjukkan kemungkinan adanya keraguan besar (*substantial doubt*) tentang kemampuan entitas untuk bertahan, (2) jika ada kemungkinan keraguan besar, kumpulkan dan evaluasi bukti tentang rencana manajemen untuk mengurangi masalah ini dan (3) jika ada keraguan besar, review

pengungkapan klien dan modifikasi pendapat audit. SAS No. 58 dan No. 59 menghapuskan pilihan pendapat “tergantung kepada” karena keraguan tentang kandungan informasi pendapat tersebut. Sebaliknya, pendapat wajar dengan pengecualian “tergantung kepada” dikomunikasikan sebagai “bahasa khusus” yang dimasukkan dalam pendapat wajar tanpa pengecualian (Schaub et al. [2003]).

Standar profesional semakin diperketat oleh SAS No. 64, “*Omnibus Statement on Auditing Standards—1990*,” (AICPA [1990] dalam Carcello et al. [1995]), berlaku efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah 31 desember 1990. SAS No. 64 mengklarifikasi penggunaan kata-kata pada paragraf yang mendiskusikan ketidakpastian kelangsungan usaha dan mengharuskan penggunaan istilah “keraguan besar” dan “kelangsungan usaha.”

RESPON AUDITOR DALAM PRAKTIK

Pada tahun 1984, Mutchler et al. melakukan riset tentang persepsi auditor *Big Eight* tentang peran mereka ketika ada ketidakpastian kelangsungan hidup klien. Hanya beberapa responden yang menyakini bahwa peran mereka lebih dari hanya memverifikasi penyajian laporan keuangan secara wajar dan yakin mereka bertugas memberikan sinyal kepada pengguna dengan menunjukkan kesulitan kelangsungan hidup klien. Peneliti lalu menyimpulkan bahwa kurangnya konsensus mungkin merupakan salah alasan ASB mengalami kesulitan menghapuskan pilihan pendapat “tergantung kepada” (*subject-to opinion*).

SAS No. 34 (AICPA [1981]) dan SAS No. 59 (AICPA [1988]) telah menambah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan ketidakpastian kelangsungan usaha. Publik akan mengharapkan auditor lebih cenderung memodifikasi pendapat terkait kebangkrutan di hadapan standar yang ketat ini (Carcello et al. [1995] dalam Geiger et al. [2001]). Pada tahun 1995, Carcello et al. (dalam Geiger et al. [2001]), melakukan riset yang menemukan bukti meningkatnya kecenderungan KAP memodifikasi pendapat terkait kebangkrutan setelah penerbitan SAS No. 34, akan tetapi, tidak setelah penerbitan SAS No. 59.

Riset-riset sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa kurang dari 50 persen perusahaan yang mengajukan kebangkrutan telah menerima GCO terhadap laporan keuangan sebelumnya (Altman [1982]; Menon and Schwartz [1987]; Hopwood et al. [1989]; McKeown et al. [1991a]; Chen and Church [1992] dalam Geiger et al [2001]). Beberapa studi terbaru telah menguji hubungan antara kebangkrutan dan laporan audit sebelumnya pada periode sebelum dan setelah berlakunya SAS No. 59 (Raghunandan dan Rama [1995]; Carcello et al. [1995], [1997] dalam Geiger et al [2001]). Ketika klien mengajukan permohonan kebangkrutan tanpa menerima GCO sebelumnya, lebih besar kemungkinan auditor akan mengalami tuntutan hukum yang dikaitkan dengan kos dan kerugian kehilangan reputasi.

Carcello dan Palmrose [1993],[1994] dalam Geiger et al [2001] menyelidiki tuntutan hukum terhadap auditor yang terkait dengan kebangkrutan, dan

menemukan bahwa auditor yang telah menerbitkan laporan GCO sebelum klien memohon kebangkrutan mengalami “tingkat pembebasan yang lebih tinggi dan jumlah kewajiban pembayaran yang lebih rendah (rata-rata dan median).” Riset Geiger et al. [2001] ini mendukung argumen bahwa karena PSLRA memberikan pembebasan tuntutan hukum bagi profesi, auditor secara komparatif tidak terlalu memprioritaskan isu kewajiban hukum setelah pemberlakuannya, yang selanjutnya menyebabkan auditor tidak cenderung mengeluarkan GCO sebelumnya bagi perusahaan yang bankrut.

Riset Geiger dan Raghunandan tahun 2002 (dalam Geiger [2003]) menemukan penurunan kecenderungan auditor mengeluarkan laporan modifikasi kelangsungan hidup terhadap perusahaan dengan kesulitan keuangan di AS selama tahun 1990-an. Mereka menekankan bahwa hasil empiris ini kemungkinan disebabkan perubahan kewajiban hukum yang dihadapi auditor dengan diberlakukannya PSLRA pada tahun 1995 dan *The Securities Litigation Uniform Standards Act* tahun 1998. Namun, alternatif penjelasan lain menyatakan bahwa penurunan pendapat modifikasi kelangsungan hidup disebabkan peningkatan signifikan dari keutamaan pendapatan (*fees*) nonaudit bagi KAP di tahun-tahun terakhir ini. Alternatif penjelasan ini tidak didukung oleh riset Geiger et al. [2003] yang tidak menemukan hubungan antara pendapatan nonaudit dengan pendapat audit yang dikeluarkan auditor. Secara keseluruhan tidak ada dampak negatif dari pendapatan nonaudit terhadap auditor yang melaporkan penilaiannya tentang perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Salah satu penjelasan tentang keengganan auditor mengeluarkan pendapat kelangsungan usaha dijelaskan oleh Ponemon et al. [1994], yang menyatakan bahwa banyak kontroversi meliputi isu yang mengharuskan auditor memberikan sinyal peringatan awal tentang kondisi keuangan kliennya. Selama hampir satu dekade, profesi akuntansi memberi perhatian pada ketepatan tentang apa yang dikenal sebagai “bendera merah” bagi perusahaan dengan kesulitan keuangan. Beberapa pendapat seperti *The (Cohen) Commission on Auditors’ Responsibilities* [1978] serta Elliot dan Jacobson [1987] telah menyatakan bahwa ada beberapa masalah signifikan dan, bahkan, dampak negatif ketika mengharuskan auditor untuk melaporkan kejadian di masa depan. Salah satu masalah, misalnya, adalah penerbitan pendapat kelangsungan hidup bisa memperparah atau malah menyebabkan penurunan kondisi keuangan perusahaan (Elliott dan Jacobson [1987]; Bell [1991] dalam Ponemon et al. [1994]). Masalah kedua berhubungan dengan dengan keraguan besar itu sendiri, yang belum didefinisikan dengan jelas dalam literatur akuntansi atau auditing, sehingga menyebabkan ambiguitas dan kemungkinan kesalahan dalam keputusan pendapat kelangsungan hidup auditor (Solomon and Krogstad [1988] dalam Ponemon et al. [1994]).

Dalam kaitannya dengan dengan pendapat dan perhatian media yang terfokus pada profesi auditing, serta kejatuhan perusahaan terkemuka yang akhirnya memfasilitasi pemberlakuan SOX pada tahun 2002, merupakan hal yang wajar untuk memperkirakan bahwa perilaku auditor akan terpengaruh secara signifikan oleh kejadian-kejadian ini. Temuan penelitian yang dilakukan Geiger et al. [2005] mendukung bahwa auditor lebih cenderung mengeluarkan pendapat audit

modifikasian keberlangsungan usaha pada periode setelah Desember 2001, juga pada periode 2002–2003.

KANDUNGAN INFORMASI PENDAPAT KELANGSUNGAN HIDUP

Beberapa riset telah menguji informasi dalam pendapat wajar dengan pengecualian dengan menguji hubungan antara pengecualian dengan *unexpected return* dari sekuritas. Firth [1978], Ball et al. [1979], serta Chow dan Rice [1982] menyimpulkan bahwa pendapat dengan pengecualian memiliki kandungan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Begitu juga, Banks dan Kinney [1982] menemukan bahwa penyesuaian *return* negatif sebelum pengeluaran laporan tahunan bagi perusahaan yang menerima pendapat wajar dengan pengecualian ketidakpastian, dan perusahaan yang menerima pendapat wajar dengan pengecualian, namun, tanpa adanya ketidakpastian yang diungkapkan di catatan kaki. Elliot [1982] dan Dodd et al. [1984] juga menemukan bahwa *abnormal return* terjadi sebelum pengumuman pendapat wajar dengan pengecualian, namun mereka menyimpulkan bahwa pendapat itu sendiri tidak mengandung informasi. Dilanjutkan oleh Dopuch et al. [1986] yang menemukan reaksi harga saham negatif yang signifikan terhadap pengungkapan media tentang pendapat wajar dengan pengecualian “tergantung kepada.” Yang perlu diperhatikan adalah pernyataan Bailey [1982] yang menekankan bahwa karena pendapat audit dilaporkan bersamaan dengan laporan keuangan menyulitkan untuk mengisolasi reaksi pasar terhadap pendapat audit.

Hopwood et al. [1989] melakukan riset untuk menguji laporan wajar dengan pengecualian dikaitkan dengan kegagalan keuangan. Riset ini menyelidiki kegunaan pendapat audit dalam memberikan daya penjelasan tambahan (*incremental explanatory power*) terhadap kebangkrutan. Hasil menunjukkan adanya efek penjelasan tambahan dari pendapat “tergantung kepada” dan pendapat kelangsungan hidup yang dikeluarkan auditor.

Riset tentang kandungan informasi dari laporan audit dengan pendapat modifikasi kelangsungan hidup di AS dan Inggris menunjukkan bahwa laporan audit modifikasi tidak memiliki kandungan informasi bagi pengguna jika kontijensi kelangsungan hidup diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Setelah pemberlakuan SOX, Bessel et al. [2003] melakukan riset untuk menguji apakah laporan auditor modifikasian (wajar dengan pengecualian) di Australia (laporan “penekanan tentang suatu hal” atau “kecuali untuk” memiliki kandungan informasi bagi pengguna. Hasil riset di Australia menunjukkan bahwa untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, modifikasi laporan dalam bentuk apapun tidak meningkatkan persepsi risiko atau pengambilan keputusan pengguna secara signifikan.

Menurut Hopwood [1989], kegunaan pendapat modifikasian sebagai bendera merah tidak selalu berarti pendapat ini memiliki informasi unik tentang prediksi kebangkrutan. Konsistensi dari pengecualian dan pendapat “tergantung kepada,” termasuk pendapat yang diterbitkan untuk ketidakpastian kelangsungan hidup entitas, diikuti oleh pengungkapan kejadian atau kondisi yang menimbulkan

pengecualian tersebut di catatan kaki. Namun, jika ada hubungan yang signifikan antara pengecualian tersebut dengan kebangkrutan, maka konsistensi pengecualian dan pendapat “tergantung kepada” untuk selain ketidakpastian kelangsungan usaha dapat berperan sebagai sinyal peringatan bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini akan menunjukkan bahwa ada pengungkapan (*disclosures*) catatan kaki yang pantas diperhatikan oleh pengguna.

Altman dan McGough [1974] dalam Hopwood et al. [1989] menemukan bahwa 46,4 persen perusahaan bankrut yang menjadi sampel penelitian mereka telah menerima GCO (laporan modifikasian kelangsungan usaha) satu tahun sebelum peristiwa kebangkrutan. Deakin [1977] dalam Hopwood et al. [1989] menguji kasus-kasus dua tahun sebelum kejadian kebangkrutan dan menemukan bahwa 14,9 persen perusahaan bankrut telah menerima GCO. Altman [1982] menemukan bahwa 48,1 persen perusahaan yang bankrut selama tahun 1970-1982 telah menerima pengecualian kelangsungan usaha satu tahun sebelum bankrut. Menon dan Schwartz [1986] menemukan 43 persen dari perusahaan yang bankrut selama tahun 1974-1983 telah menerima pengecualian kelangsungan usaha satu tahun sebelum bankrut.

Altman [1982] dalam Hopwood [1986] melakukan pendekatan yang berbeda melalui sampel yang lebih umum, terdiri dari perusahaan yang menerima GCO selama tahun 1972-1978. Hanya 25 persen dari perusahaan ini yang mengajukan petisi kebangkrutan sampai tahun 1979. Jelas, ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan lebih besar bagi penerima GCO tidak menjadi bankrut. Namun,

besarnya proporsi perusahaan yang tidak bankrut dibanding perusahaan yang bankrut dan relatif jaranganya GCO itu sendiri menunjukkan bahwa perusahaan yang bankrut lebih cenderung menerima pendapat wajar dengan pengecualian dan GCO berguna sebagai sinyal peringatan akan kebangkrutan.

Schaub et al. [2003] melakukan riset untuk memastikan apakah pendapat audit berisi informasi penting bagi pengguna laporan keuangan dan apakah akuntan memiliki kualifikasi untuk membuat penilaian akurat tentang kemampuan entitas untuk bertahan hidup. Bukti yang ditemukan mengindikasikan bahwa perubahan nama pendapat audit karena pemberlakuan SAS No. 58 dan No. 59 pada tahun 1998, yang menghapus pendapat wajar dengan pengecualian “tergantung kepada” terhadap pendapat kelangsungan usaha hanyalah bersifat kosmetik dan tidak mempengaruhi kandungan informasi dari pendapat tersebut ketika GCO dengan bahasa khusus diumumkan di media keuangan.

Hasil riset menyelidiki apakah pengumuman GCO memiliki kandungan informasi bagi investor, walaupun terjadi perubahan yang dibawa oleh SAS No. 58 dan No. 59. Hopwood [1994] didorong oleh pernyataan *The Cohen Commission*, mengutip riset sebelumnya, yang menduga bahwa model prediksi kesulitan keuangan berbasis rasio lebih bermanfaat daripada pendapat auditor sebagai indikator kebangkrutan. Hopwood et al [1994] membandingkan pendapat aktual auditor dan model lingkungan keputusan auditor sebenarnya. Hasil riset tidak mendukung pendapat literatur riset sebelumnya yang menyatakan bahwa pendapat auditor merupakan indikator kebangkrutan yang buruk relatif terhadap

model prediksi statistik. Namun, harus diperhatikan bahwa bahkan tidak satu pun dari keduanya mampu memprediksi setiap perusahaan yang bankrut dengan tepat. Walaupun publik mengharapkan auditor dapat memprediksi setiap perusahaan yang akan bankrut, hal itu mustahil dilakukan. Terlihat bahwa kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang timbul dari harapan publik akan adanya bendera merah yang mengindikasikan kebangkrutan mungkin dapat dengan baik dijumpai dengan mendidik publik tentang kesulitan prediksi kebangkrutan dan perlunya menyeimbangkan keakuratan dalam prediksi kebangkrutan dengan keakuratan memprediksi perusahaan nonbankrut yang jumlahnya jauh lebih banyak (Hopwood et al. [1994]).

SIMPULAN

Tuntutan publik agar pendapat kelangsungan usaha (GCO) berperan sebagai sinyal peringatan awal sebelum terjadinya kebangkrutan entitas menimbulkan dilema bagi auditor. Hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penerbitan GCO terhadap entitas yang menerimanya juga bagi KAP yang mengeluarkannya.

Kejatuhan perusahaan-perusahaan terkemuka beberapa tahun terakhir ini membuat tuntutan ini semakin gencar. Akhirnya, difasilitasi oleh pihak legislatif AS, tuntutan publik ini diwujudkan dengan mengeluarkan SOX. Di hadapan kemungkinan tuntutan hukum berat yang semakin tinggi, sejak berlakunya SOX, ditambah dengan respon dewan pembuat standar auditing AS yang terus mengeluarkan standar profesi tentang GCO yang semakin ketat, membuat auditor,

mau tidak mau, semakin konservatif. Riset yang dilakukan menemukan bahwa auditor cenderung mengeluarkan pendapat GCO sejak berlakunya SOX. Beberapa temuan riset menunjukkan bahwa pendapat GCO yang dikeluarkan auditor memang memiliki kandungan informasi bagi pengguna laporan keuangan, yang ditandai dengan reaksi pasar di sekitar tanggal pengumuman laporan audit tersebut. Namun, ironisnya, beberapa temuan riset yang dilakukan menemukan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang menerima pendapat GCO yang ternyata benar-benar mengalami kebangkrutan pada periode setelahnya. Ini menunjukkan bahwa auditor mustahil dapat melakukan penilaian kebangkrutan dengan tepat karena sulitnya pelaksanaan prediksi tersebut, dan pendapat GCO itu sendiri tidak dapat menjadi prediktor yang tepat terhadap kebangkrutan entitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bessell, Max, Asokan Anandarajan dan Ahson Umar. "Information Content, Audit Reports And Going-Concern: An Australian Study." *Accounting and Finance* Vol. 43 (2003): 261-282.
- Boynton, William C; Dan Walter G. Kell. *Modern Auditing*. Sixth Edition. John Wiley & Sons, Inc.:New York,1996.
- Carcello, Joseph V., Dana R. Hermanson, dan H. Fenwick Huss. "Temporal Changes in Bankruptcy-Related Reporting." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* Vol. 14 No. 2 (Fall, 1995).
- Geiger, Marshall A. dan Dasaratha V. Rama. "Audit Fees, Nonaudit Fees, and Auditor Reporting on Stressed Companies." *Auditing: A Journal Of Practice & Theory* Vol. 22 No. 2 (September 2003): 53-69.
-dan K. Raghunandan. "Research Notes: Bankruptcies, Audit Reports, and The Reform Act." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* Vol. 20 No. 1 (March, 2001): 187-195.
- dan Dasaratha V. Rama. "Recent Changes in the Association between Bankruptcies and Prior Audit Opinions." *Auditing: A Journal Of Practice & Theory* Vol. 24 No. 1 (May 2005): 21-35.
- Hopwood, William, James McKeown, dan Jane mutchler. "A Test of The Incremental Explanatory Power of Opinions Qualified for Consistency and Uncertainty." *The Accounting Review* Vol. LXIV No. 1 (January, 1989): 28-.
- "A Reexamination of Auditor Versus Model Accuracy within Context of the Going-Concern Opinion Decision." *Contemporary accounting research* (Spring, 1994): 409-431.
- Mutchler, Jane F. "Auditors' Perceptions of the Going-Concern Opinion Decision." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* Vol. 3 No. 2 (Spring, 1984): 17-29.
- Schaub, Mark dan Michael J. Highfield. "On the Information Content of Going Concern Opinions: The Effects of SAS Numbers 58 and 59." *Journal of Asset Management* Vol. 4 No. 1 (2003): 22-31.
- Tackett, James, Fran Wolf dan Gregory Claypool. "Sarbanes-Oxley and Audit Failure: A Critical Examination." *Managerial Auditing Journal* Vol. 19 No. 3 (2004): 340-350.